

**PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERAJAAN BELANDA
TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI
SOSIAL BELANDA DI INDONESIA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dalam persetujuan ini selanjutnya disebut sebagai para "Pihak".

BERMAKSUD untuk mengizinkan pembayaran tunjangan asuransi sosial Belanda kepada orang-orang yang berdiam di Indonesia dan untuk mengatur kerjasama antara kedua negara berkenaan dengan pelaksanaan skema asuransi sosial.

MENGAKUI adanya manfaat bersama dari kerjasama tersebut untuk rakyat kedua pihak,

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Pembayaran tunjangan sosial Pemerintah Belanda akan meliputi:

- a. Tunjangan orang sakit;
- b. Tunjangan orang cacat;
- c. Tunjangan orang cacat yang bekerja sendiri;
- d. Pensiun umum hari tua;
- e. Tunjangan umum sanak keluarga yang masih hidup;
- f. Tunjangan umum anak-anak.

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku bagi para penerima tunjangan serta anggota-anggota keluarga mereka selama mereka hidup atau tinggal di Indonesia.

Pasal 3

Penerima tunjangan adalah setiap orang yang berhak untuk mendapatkan tunjangan atau pensiun menurut perundangan Belanda mengenai tunjangan asuransi sosial yang disebut dalam Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 4

Setiap ketentuan perundangan-undangan Belanda yang membatasi pembayaran tunjangan semata-mata karena penerima tunjangan atau anggota keluarganya tinggal di luar atau tidak berada di Belanda tidak akan berlaku bagi penerima tunjangan atau anggota keluarganya yang tinggal atau diam di Indonesia

Pasal 5

- a. Penguasa yang berwenang di Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, yang akan mengkoordinir lembaga-lembaga lainnya yang menyangkut penguasa pajak, pencatatan penduduk, pencatatan perkawinan, agen-agen tenaga kerja, badan-badan yang mempunyai informasi medis mengenai penerima tunjangan serta sekolah-sekolah.
- b. Pihak yang berwenang di Belanda adalah Menteri Urusan Sosial dan Tenaga Kerja, dan lembaga yang berwenang adalah setiap lembaga yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan perundangan tunjangan asuransi sosial Belanda yang disebut dalam Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 6

Untuk menentukan hak atas tunjangan dan keabsahan pembayaran menurut skema asuransi sosial Belanda, penerima tunjangan harus memberikan bukti identitas yang dikeluarkan oleh penguasa Indonesia yang berwenang.

Pasal 7

1. Pihak yang berwenang di Belanda dapat mengajukan permintaan kepada pihak yang berwenang di Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap identitas dari penerima tunjangan atau anggota keluarganya serta memberikan informasi mengenai alamat, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, keadaan keluarga, kemampuan bekerja atau kondisi kesehatan dari pemohon atau penerima dan jika ada keluarganya serta dokumen relevan lainnya untuk memproses permohonan atau pembayaran tunjangan lebih lanjut. Verifikasi dan informasi tersebut akan diberikan oleh pihak yang berwenang di Indonesia setelah menerima informasi awal dari pihak yang berwenang

di Belanda.

2. Lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda, atau atas permintaan mereka, perwakilan diplomatik atau konsuler Belanda, dapat secara langsung menghubungi penerima tunjangan atau wakilnya dan lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia untuk menentukan hak atas tunjangan dan keabsahan pembayaran, asalkan kontak-kontak seperti itu diberitahukan kepada penguasa yang berwenang di Indonesia.

Pasal 8

Lembaga-lembaga Indonesia yang berwenang akan memenuhi permintaan seperti disebut dalam Pasal 7 dengan memeriksa kebenaran identitas penerima tunjangan dan mengirimkan dokumen yang telah diverifikasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda. Semua biaya dan ongkos untuk keperluan verifikasi terhadap identitas atau data lain yang diminta serta laporan-laporan pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda.

Pasal 9

- a. Lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda harus menggunakan laporan pemeriksaan kesehatan dan data administrasi yang diberikan oleh penguasa dan lembaga yang berwenang di Indonesia untuk menentukan tingkat ketidak-mampuan bekerja penerima tunjangan. Lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda berhak untuk meminta kepada pemohon atau penerima tunjangan guna diperiksa oleh dokter pilihan mereka sendiri, atau berhak untuk memanggil orang bersangkutan guna menjalani pemeriksaan kesehatan di Belanda.
- b. Yang bersangkutan wajib memenuhi permintaan untuk menjalani pemeriksaan medis di Indonesia atau di Belanda. Apabila karena alasan medis yang bersangkutan tidak dapat mengadakan perjalanan ke Belanda dimana ia dipanggil oleh lembaga Belanda yang berwenang, ia harus segera memberitahukan kepada lembaga itu dan kemudian menyampaikan pernyataan medis yang dikeluarkan dokter yang ditunjuk untuk keperluan ini oleh lembaga Belanda yang berwenang. Pernyataan ini harus mencakup alasan medis mengapa tidak sehat untuk mengadakan perjalanan dan juga dugaan berapa lama akan tidak sehat.
- c. Ongkos untuk pemeriksaan kesehatan termasuk biaya perjalanan dan akomodasi di Belanda ditanggung oleh lembaga yang berwenang di Belanda.

Pasal 10

- a. Setiap keputusan pengadilan atau keputusan dari lembaga atau pihak yang berwenang di Belanda mengenai pengembalian pembayaran asuransi sosial yang tidak semestinya akan diakui oleh penguasa Indonesia yang berwenang.

- b. Pengakuan tersebut dapat ditolak apabila bertentangan dengan ketertiban masyarakat di Indonesia dimana ketetapan atau keputusan tersebut akan dilaksanakan.

Pasal 11

1. Lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda dapat menolak untuk melakukan pembayaran, menunda atau menarik kembali tunjangan sosial, apabila menurut pertimbangan mereka, pemohon atau penerima tunjangan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menyerahkan informasi dan pemeriksaan yang relevan seperti ditentukan dalam Persetujuan ini.
2. Lembaga-lembaga yang berwenang di Belanda dapat menolak atau menunda pembayaran tunjangan apabila pemohon atau penerima tunjangan atau suatu lembaga Indonesia atau suatu lembaga di Indonesia tidak memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu enam minggu terhitung dari tanggal permintaan diajukan.

Pasal 12

Pemerintah Indonesia tidak akan bertanggung-jawab atas tuntutan tidak dibayarnya tunjangan asuransi Sosial Belanda yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

Pasal 13

Setiap perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai dengan jalan konsultasi.

Pasal 14

Salah satu Pihak boleh mengajukan permintaan tertulis untuk mengadakan perubahan atau amandemen atas bagian mana saja dari Persetujuan ini. Setiap perubahan atau amandemen yang telah disetujui oleh para Pihak mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan oleh para Pihak.

Pasal 15

Perjanjian ini akan berlaku sementara pada hari ketiga puluh setelah dilakukan penandatanganan dan akan berlaku secara tetap pada hari pertama bulan ketiga setelah tanggal pemberitahuan terakhir bahwa masing-masing prosedur konstitusional atau hukum yang diperlukan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sudah terpenuhi, dengan pengertian bahwa Pasal 4 akan mulai berlaku surut dari tanggal 1 Januari 2000.

Pasal 16

Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali kapan saja ada pihak yang mengecamnya. Seandainya dilancarkan kecaman, persetujuan ini akan tetap berlaku sampai akhir tahun kalender setelah tahun dalam waktu mana kecaman itu dilancarkan.

SEBAGAI SAKSINYA, yang bertanda-tangan dibawah ini dengan kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Persetujuan ini.

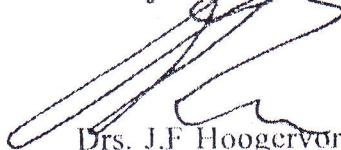
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta hari Senin tanggal 6 Maret 2000 dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris. Semua naskah sama-sama autentik, apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Perjanjian ini, naskah bahasa Inggris akan berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia



Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

Untuk Pemerintah
Kerajaan Belanda



Drs. J.F Hoogervorst
Menteri Urusan Sosial dan Tenaga Kerja

AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ON THE PAYMENT OF
DUTCH SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN INDONESIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands, hereinafter referred to as the "Parties";

Wishing to allow the payment of Dutch social insurance benefits to persons residing in Indonesia and to regulate the cooperation between the two countries with respect to the enforcement of social insurance schemes;

Recognizing the mutual benefits derived from such cooperation for the people of both Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries,

have agreed as follows:

Article 1

The payment of Dutch statutory social insurance benefits shall cover:

- a. the Sickness Benefits;
- b. the Disablement Benefits;
- c. the Self-employed Persons Disablement Benefits;
- d. the General Old Age Pensions;
- e. the General Surviving Relatives Benefits;
- f. the General Child Benefits.

Article 2

This Agreement shall apply to beneficiaries as well as to the members of their families insofar as they live or reside in Indonesia.

Article 3

Beneficiary means every person who is entitled to a benefit or a pension under the Dutch legislation relating to social insurance benefits referred to under Article 1 of this Agreement.

Article 4

Any provision of the Dutch legislation which restricts payment of benefits solely because the beneficiary or the member of his family resides outside or is absent from the Netherlands shall not be applicable to beneficiaries or their family members who live or reside in Indonesia.

Article 5

1. The competent authority in Indonesia is the Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Alleviation, who will coordinate the other competent institutions which include the tax authorities, population registers, marriage registers, employment agencies, agencies having available medical information on beneficiaries, and schools.

2. The competent authority in the Netherlands is the Minister of Social Affairs and Employment, and the competent institutions are every institution being responsible for the administration of the legislation of the Dutch social insurance benefits referred to under Article 1 of this Agreement.

Article 6

In order to determine the entitlement to benefit and legitimacy of payments under the Dutch social insurance schemes, the beneficiary shall provide a proof of identity issued by the Indonesian competent authority.

Article 7

1. The Dutch competent institutions may request the Indonesian competent authority to verify the identification of the beneficiary or his family members and to provide information on address, work, education, income, family situation, ability for work or medical condition of the applicant or the beneficiary and, if any, his family members and other relevant documents for processing the application or paying the benefits further. Such verification and information will be provided by the Indonesian competent authority upon receipt of initial information from the Dutch competent authority.

2. The Dutch competent institutions or, on their request, the Dutch diplomatic and consular representatives, may contact the beneficiaries or their representatives and the Indonesian competent institutions directly in order to determine entitlement to benefits and legitimacy of payments, provided that such contacts be communicated to the Indonesian competent authority.

Article 8

The Indonesian competent institutions meet the request referred to in Article 7 by verifying the identity of the beneficiary and sending copies of the verified documents to the Dutch competent institutions. All expenses and costs for the verification of identification or other required data and medical reports shall be borne by the Dutch competent institutions.

Article 9

1. The Dutch competent institutions shall use the medical reports and the administrative data provided by the Indonesian competent authority and institutions in order to determine the degree of disability for work of the beneficiary. The Dutch competent institutions are entitled to have the claimant or beneficiary examined by a doctor of their own choice or to summon the person involved to undergo a medical examination in the Netherlands.

2. The person concerned is obliged to comply with a request to undergo a medical examination in Indonesia or in the Netherlands. If for medical reason the person concerned is unable to travel to the Netherlands where he/she has been summoned by the Dutch competent institution, the person shall inform that institution immediately and then submit a medical statement issued by a doctor designated for this purpose by the Dutch competent institution. This statement shall include the medical reasons for his or her unfitness for travelling as well as the expected duration of this unfitness.

3. The costs of the examination including the expenses for travel and accommodation in the Netherlands shall be borne by the Dutch competent institution.

Article 10

1. Any enforceable court decisions or decrees by the Dutch competent institutions or authorities regarding the recovery of undue social insurance payments shall be recognized by the Indonesian competent authority.

2. Recognition may be refused if it is contrary to the public order of Indonesia where the decision or decree should be enforced.

Article 11

1. The Dutch competent institutions may refuse to pay, suspend or withdraw

a benefit if, in their judgement, the applicant or beneficiary fails to fulfil the requirements of submitting the relevant information and examination provided for in this Agreement.

2. The Dutch competent institutions may refuse to pay or suspend a benefit if the applicant or beneficiary or an Indonesian institution does not provide the requested information within a period of six weeks counted from the date of the request.

Article 12

The Government of Indonesia shall not be liable for any claim of the unpaid benefits of the Dutch Social insurance provided for in this Agreement.

Article 13

Any difference between Parties concerning the interpretation of the present Agreement shall be settled amicably through consultation.

Article 14

Either Party may request in writing a modification or amendment of any part of the present Agreement. Any modification or amendment which has been agreed upon by the Parties shall enter into force on the date as will be determined by the Parties.

Article 15

This Agreement shall be provisionally applied from the thirtieth day following the date of signing and it shall enter into force definitely on the first day of the third month after the date of the last notification that respective constitutional or legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been fulfilled,

on the understanding that Article 4 shall enter into force with retroactive effect to 1 January 2000.

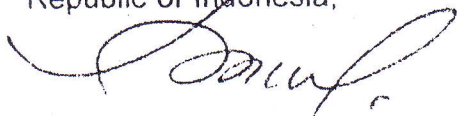
Article 16

This Agreement shall remain in force indefinitely unless either party denounces it any time. In the event of the denunciation, this Agreement shall remain in force until the end of the calendar year following the year in which the denunciation has been done.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

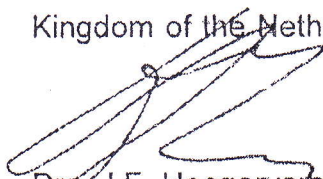
Done in duplicate in Jakarta this Monday, March 6, 2000, in Indonesian, Dutch, and English languages. All texts are equally authentic; in case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia,



Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA
Coordinating Minister for People's
Welfare and Poverty Alleviation

For the Government of the
Kingdom of the Netherlands,



Drs. J.F. Hoogervorst
State Secretary for Social Affairs
and Employment

**VERDRAG TUSSEN
DE REPUBLIEK INDONESIAË
EN
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
INZAKE DE BETALING VAN NEDERLANDSE
SOCIALEVERZEKERINGSUITKERINGEN IN INDONESIAË**

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië, hierna te noemen "Partijen",

Wensende de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen aan personen wonende in Indonesië mogelijk te maken, en de samenwerking tussen beide landen te regelen teneinde de rechtmatige uitvoering van de Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen te bevorderen,

Onderkennende de wederzijdse voordelen voortkomend uit de samenwerking, voor de onderdanen van beide landen,

Ingevolge de huidige wet- en regelgeving van beide Partijen;

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De betaling van Nederlandse wettelijke socialeverzekeringsuitkeringen omvat:

- a. de ziekte-uitkeringen;
- b. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
- c. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zelfstandigen;
- d. de algemene ouderdomspensioenen;
- e. de algemene nabestaandenuitkeringen;
- f. de algemene kinderbijslagen.

Artikel 2

Dit Verdrag is van toepassing op uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden voor zover zij wonen of verblijven in Indonesië.

Artikel 3

Onder uitkeringsgerechtigde wordt verstaan iedere persoon die recht heeft op een uitkering of pensioen ingevolge de Nederlandse wetgeving aangaande de in artikel 1 van dit Verdrag genoemde socialeverzekeringsuitkeringen.

Artikel 4

Elke bepaling van de Nederlandse wetgeving die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend op grond van het feit dat de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid woont buiten of zich niet bevindt op het grondgebied van Nederland, is niet van toepassing op uitkeringsgerechtigden of hun gezinsleden die leven of wonen in Indonesië.

Artikel 5

1. De bevoegde autoriteit in Indonesië is de Coördinerend Minister van Welzijn en Verlichting van Armoede die de andere bevoegde instituties coördineert waaronder de belastingautoriteiten, bevolkingsregisters, huwelijksregisters, arbeidsbureaus, instellingen die beschikken over medische informatie van uitkeringsgerechtigden, en scholen.

2. De bevoegde autoriteit in Nederland is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de bevoegde instituties zijn elke institutie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wetgeving ter zake van de in artikel 1 van dit Verdrag genoemde Nederlandse sociale-verzekeringsuitkeringen.

Artikel 6

Om het recht op uitkering en de rechtmatigheid van betalingen krachtens de Nederlandse socialeverzekeringswetten vast te stellen dient de uitkeringsgerechtigde een identiteitsbewijs te overleggen dat door de Indonesische bevoegde autoriteit is uitgegeven.

Artikel 7

1. De Nederlandse bevoegde instituties kunnen de Indonesische bevoegde autoriteit verzoeken om de identiteit te verifiëren van de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinsleden, en informatie te verschaffen over adres, werk, onderwijs, inkomen, gezinssituatie, arbeidsgeschiktheid of medische toestand van de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde en, indien aanwezig, van zijn gezinsleden, alsmede andere relevante documenten voor de behandeling van de aanvraag of de verdere betaling van de uitkeringen.

2. De Nederlandse bevoegde instituties of, op hun verzoek, de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers kunnen rechtstreeks in contact treden met de uitkeringsgerechtigden of hun vertegenwoordigers en de Indonesische bevoegde instituties teneinde het recht op uitkeringen en de rechtmatigheid van betalingen vast te stellen, mits zulke contacten worden gemeld aan de Indonesische bevoegde autoriteit.

Artikel 8

De Indonesische bevoegde instituties voldoen aan het verzoek als bedoeld in artikel 7 door de identiteit van de uitkeringsgerechtigde te verifiëren en door toezending van afschriften van de geverifieerde documenten aan de Nederlandse bevoegde instituties. Alle uitgaven en kosten verbonden aan de verificatie van de identiteit en andere benodigde gegevens en medische onderzoeken zijn voor rekening van de Nederlandse bevoegde instituties.

Artikel 9

1. De Nederlandse bevoegde instituties gebruiken de geneeskundige rapporten en administratieve gegevens die door de Indonesische bevoegde autoriteit en instituties worden verstrekt voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van de uitkeringsgerechtigde. De Nederlandse bevoegde instituties hebben het recht de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde door een arts van hun keuze te doen onderzoeken of de betrokkene op te roepen om een medisch onderzoek te ondergaan in Nederland.

2. De betrokkene is verplicht gehoor te geven aan een oproep om een medisch onderzoek te ondergaan in Indonesië of in Nederland. Indien de betrokken persoon om medische redenen niet in staat is naar Nederland te reizen waarheen de Nederlandse bevoegde institutie hem of haar heeft opgeroepen, informeert de betrokkene die institutie onmiddellijk onder overlegging van een medische verklaring die is afgegeven door een arts die daartoe is aangewezen door de Nederlandse bevoegde institutie. Deze verklaring bevat de medische redenen van zijn of haar ongeschiktheid tot reizen en de verwachte duur van deze ongeschiktheid.

3. De kosten van het onderzoek inclusief de uitgaven voor reis en verblijf in Nederland, worden gedragen door de Nederlandse bevoegde institutie.

Artikel 10

1. Elke voor tenuitvoerlegging vatbare rechterlijke uitspraak of besluit van de Nederlandse bevoegde instituties of autoriteiten inzake de terugvordering van onverschuldigde betalingen van socialeverzekeringsuitkeringen, dienen door de Indonesische bevoegde autoriteiten te worden erkend.

2. De erkenning kan worden geweigerd indien zij in strijd is met de openbare orde van Indonesië waar de uitspraak of het besluit moet worden

tenuitvoergelegd.

Artikel 11

1. De Nederlandse bevoegde instituties kunnen de uitkering weigeren te betalen, schorsen of intrekken, indien naar hun oordeel de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde verzuimt aan de verplichtingen te voldoen om relevante informatie te verstrekken en onderzoek te ondergaan waarin dit Verdrag voorziet.

2. De Nederlandse bevoegde instituties kunnen de uitkering weigeren te betalen of schorsen indien de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde of de Indonesische institutie de gevraagde informatie niet verstrekt binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van het verzoek.

Artikel 12

De Regering van Indonesië is niet aansprakelijk voor de niet-betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen waarin dit Verdrag voorziet.

Artikel 13

Elk geschil tussen Partijen over de interpretatie van dit Verdrag zal door Partijen in minnelijk overleg worden opgelost.

Artikel 14

Elke Partij kan schriftelijk verzoeken om aanpassing of wijziging van enig onderdeel van dit Verdrag. Elke aanpassing of wijziging die door de Partijen is overeengekomen, treedt in werking op de datum zoals bepaald door Partijen.

Artikel 15

Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast met ingang van de dertigste dag na de datum van ondertekening, en treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na de datum van de laatste kennisgeving inzake de voltooiing van de respectieve constitutionele en wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag, met dien verstande dat artikel 4 met terugwerkende kracht in werking treedt tot en met 1 januari 2000.

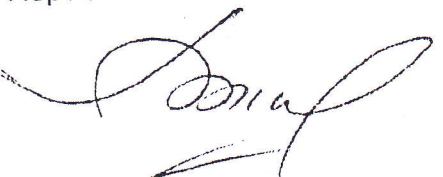
Artikel 16

Dit Verdrag blijft van kracht voor onbepaalde tijd, tenzij een Partij het op enig moment opzegt. In geval van opzegging blijft dit Verdrag van kracht tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opzegging is gedaan.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

Gedaan in tweevoud te Jakarta, op maandag 6 maart 2000, in de Indonesische, Nederlandse en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Bij geschillen over de interpretatie van dit Verdrag, is de Engelse tekst bepalend.

Voor de Regering van de
Republiek Indonesië



Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA
Coördinerend Minister van
Welzijn en Verlichting van
Armoede

Voor de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden



Drs. J.F. Hoogervorst
Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid